

21/Renja/DPMPTSP/2021 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



RENCANA KERJA (RENJA RANCANGAN AKHIR)

TAHUN 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



invest in

aceh

Jl. Ahmad Yani No. 39
Banda Aceh, Indonesia
P : +6265123170, F :
+6265123171
E : investasi@acehprov.go.id
W : dpmptsp.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan "**Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022**" yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Aceh melalui bidang penanaman modal.

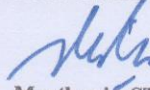
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi tercapainya cita-cita pembangunan di bidang penanaman modal dalam rentang satu tahun kedepan.

Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yaitu "**Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani**". Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, D.E.A

Pembina Tk. I

NIP. 19770805 200312 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja	2
1.1.2 Proses Penyusunan Renja	3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	15
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota Dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional.....	21
2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21

2.3.3	Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Terhadap Daerah Capaian Program Nasional/Internasional.....	22
2.3.4	Uraian tentang Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3.5	Formulasi Isu-Isu Penting	26
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPA	28
2.4.1	Uraian tentang Perbandingan antara Rancangan Awal RKPd dengan Analisis Kebutuhan	28
2.4.2	Uraian tentang Alasan Perbandingan Tersebut Dilaksanakan	28
2.4.3	Penjelasan tentang Temuan dan Catatan penting jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPd seperti Rumusan Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPd termasuk perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja	28
2.4.4	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun Yang di Rencanakan (Tabel T-C.31)	31
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	31
2.5.1	Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kab/Kota).....	31
2.5.2	Uraian tentang Kesesuaian Usulan tersebut dengan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.5.3	Tabel Usulan Program/Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun direncanakan (Tabel T-C.32) ...	32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 33

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.1.1	Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	33
3.2	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP	35
3.2.1	Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran	

	didasarkan atas Rumusan Isu-isu penting	35
	3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V.	PENUTUP	43
	5.1 Kaidah Pelaksanaan	43
	5.2 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....	43
	5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	43
 LAMPIRAN		
Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra Tahun 2020	
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA DPMPTSP	
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2022 Provinsi Aceh	
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2022 Provinsi Aceh	
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPA Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 DPMPTSP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Program yang Tidak Memenuhi Keluaran Yang Direncanakan	12
Tabel 2.2	Prioritas Pembangunan Nasional dan Aceh	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Kerja SKPA Kabupaten/Kota	3
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	5
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	5
Gambar 3.1 Program Unggulan Dalam RPJMA 2017-2022	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di sebuah wilayah. Penanaman modal dibagi atas dua kategori, yaitu : Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal atau juga disebut dengan investasi merupakan salah satu pembentuk dari sebuah perekonomian wilayah atau produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai ekonomi total dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Investasi dapat meningkatkan kemampuan sebuah daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan investasi dengan membangun pabrik atau membeli mesin serta alat produksi lainnya. Pabrik atau mesin baru tersebut akan menyebabkan perusahaan tersebut mampu memproduksi produk yang lebih banyak. Kenaikan produksi berarti total output barang dari sebuah negara bertambah dan pada akhirnya menambah nilai PDRB.

Selain meningkatkan total output barang dan jasa, investasi juga akan memberikan kesempatan kerja lebih besar. Pabrik dan mesin baru memerlukan tenaga kerja untuk mengoperasikan atau merawatnya. Keberadaan pabrik dan mesin baru menambah produktifitas tenaga kerja karena memungkinkan menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak dengan penggunaan sumber daya (bahan dan waktu) yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa investasi atau penanaman modal dapat menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan manfaat investasi sebagaimana disebutkan diatas, Pemerintah Aceh menempatkan realisasi investasi sebagai salah satu sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Aceh, yaitu: kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun investasi tidak datang ke sebuah wilayah dengan sendirinya. Banyak faktor atau determinan yang menyebabkan para penanam modal atau investor untuk memilih Aceh sebagai daerah tujuan/destinasi investasinya. Diantara dari faktor tersebut adalah ketersediaan bahan baku, kedekatan dengan pasar, kondisi politik dan keamanan yang stabil, serta ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil.

Faktor atau determinan tersebut diatas menyiratkan bahwa usaha untuk menarik investasi merupakan usaha yang melibatkan lintas sektor, mulai dari sektor hulu atau produksi hingga sektor hilir (pasar), bahkan sektor pemungkin (*enabling*) dan penunjang seperti politik/keamanan dan infrastruktur dan ketenagakerjaan. Karena itu diperlukan rencana kerja penanaman modal dan pelayanan perizinan yang mampu menjadi rujukan bersama dalam melaksanakan kebijakan sektoral dalam rangka menarik penanaman modal atau investasi dan mendorong pertumbuhan usaha di Aceh.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPA sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPA kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPA menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk

Adapun tahapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Penyusunan Renja

Kegiatan persiapan penyusunan Renja dilakukan melalui: 1). Pembentukan Tim Penyusun Renja; 2). Orientasi mengenai Renja; 3). Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja; dan 4). Pengumpulan Data dan Informasi

b. Tahap Pengolahan Data dan Informasi.

Kegiatan pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menganalisis data perizinan dan penanaman modal menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan penanaman modal.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

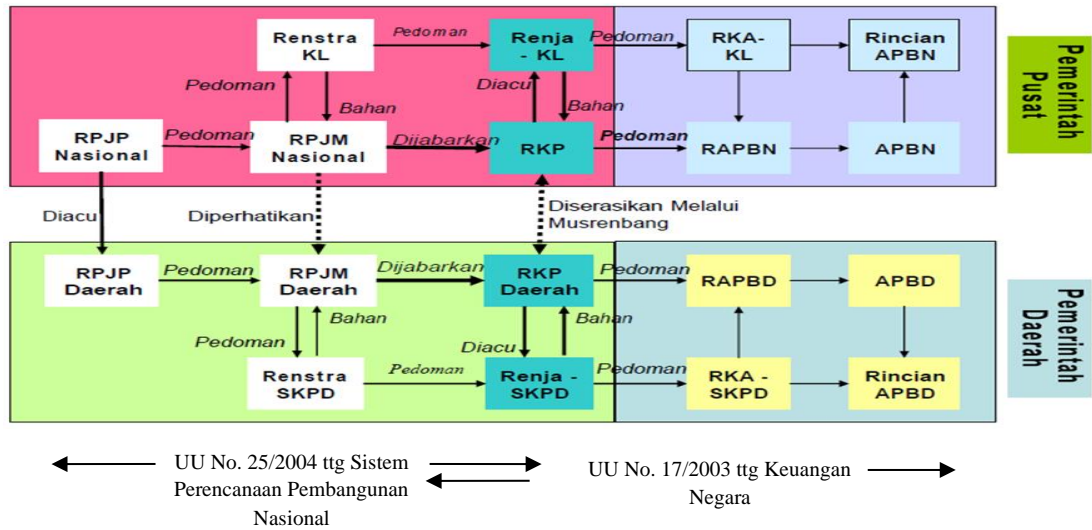
Kegiatan perumusan rancangan Renja dilaksanakan dengan Langkah sebagai berikut: 1). Analisis gambaran pelayanan SKPA; 2). Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu berdasarkan Renstra SKPA; 3). Menentukan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA; 4). Menelaah terhadap rancangan awal RKPA; 5). Merumuskan tujuan dan sasaran; 6). Menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 7). Perumusan kegiatan prioritas; 8). Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPA; 9). Penyempurnaan rancangan kerja SKPA; 10). Pembahasan forum SKPA; dan 11). Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPA sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

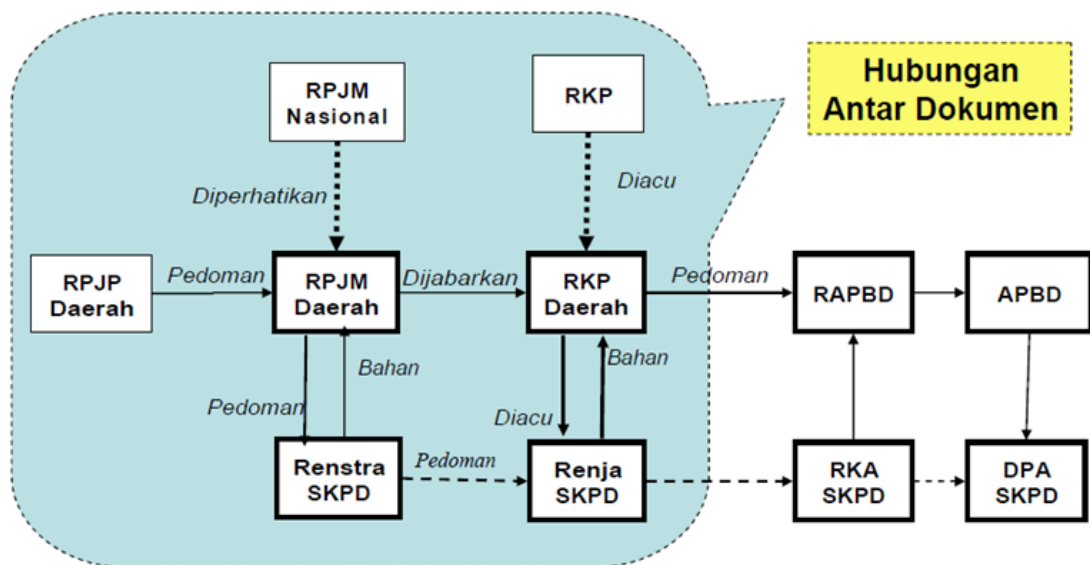
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPA dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPA sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPA yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena itu, seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023;
22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Aceh No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
25. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
26. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
27. Qanun Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Gubernur Aceh No. 96 tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Aceh;

29. Peraturan Gubernur Aceh No. 97 tahun 2014 tentang Kawasan Perhatian Investasi Aceh;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
31. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberi arah pengembangan investasi pada tahun ke lima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
2. Acuan bagi seluruh stakeholder penanaman modal dalam memadukan kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Aceh.
3. Pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun lalu, menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh Tahun 2020 dan Renstra perangkat Aceh Tahun 2017-2022 (tabel terlampir), Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (tabel terlampir), Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh; Review terhadap Rancangan Awal RKPA.

- Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta Program dan Kegiatan.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (tabel terlampir).
- Bab V : Penutup.

BAB II

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU ACEH TAHUN 2020**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 (tabel terlampir).

Pada tahun 2020, DPMPTSP Aceh menargetkan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.445.436.631,- (96,17%) dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 26.284.987.559,- (65,75%). Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 berdasarkan realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan DPMPTSP Tahun 2020

No	Program	Realisasi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,99%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58,83
	- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan Listrik	67,09
	- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	99,40
	- Penyediaan Alat Tulis kantor	99,24
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93,23
	- penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	99,50
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	77,69
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	71,42
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	37,53
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	72,57
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,57	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23,90%
	- Pembangunan Gedung Kantor	1,14
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	95,74
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	88,09
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	89,45

3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97,13%
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	97,13
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	42,35%
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	42,35
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	79,46%
	- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	83,70
	- Perencanaan Penyusunan Program dan pengendalian Serta Evaluasi	90,51
	- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	86,90
	- Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	77,19
	- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe	85,96
	- Pemberdayaan Usaha	2,80
	- Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	21,10
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	82,42%
	- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah	82,42
7	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	74,96%
	- Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,08
	- Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63,05
	- Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan ke Kab/Kota	90,90
	- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	79,86
	- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	66,20
	- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan Non Perizinan	96,73
	- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	73,14

2.1.1 Uraian Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

Dari 32 kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Aceh tahun 2020 terdapat 26 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan Listrik
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- Perencanaan Penyusunan Program dan pengendalian Serta Evaluasi
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Peningkatan Promosi, Kerjasama Investasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
- Pemberdayaan Usaha
- Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
- Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengendalian dan Pengembangan Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan ke Kab/Kota
- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
- Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C

2.1.2 Uraian Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Dari 32 kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Aceh tahun 2020 terdapat 6 kegiatan yang memenuhi target yaitu:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis kantor
- penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang pelayanan perizinan dan Non Perizinan

2.1.3 Uraian Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Dari 32 kegiatan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP Aceh tahun 2020 tidak ada yang melebihi target kinerja.

2.1.4 Uraian Faktor-faktor Penyebab tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Penyebab tidak tercapainya target kinerja karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Karena Pandemi Covid-19 dimana ada beberapa target kinerja tidak bisa dilaksanakan dan ada juga yang dilaksanakan melalui zoom meeting yang tidak memerlukan anggaran khusus di bidang.
2. Beberapa utusan dari daerah kabupaten/kota tidak dapat menghadiri pelaksanaan kegiatan.

3. Terkait dengan FGD penyusunan Rancangan Awal Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Lahan Milik Daerah tidak terlaksana karena memerlukan pengkajian yang lebih dalam terhadap kebijakan diskresi daerah.
4. Tidak terealisasinya Pembangunan Gedung Kantor yang sudah dianggarkan, diakibatkan adanya sanggahan dari perusahaan yang kalah tender.

2.1.5 Uraian Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Restra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Penanaman Modal di Provinsi Aceh.

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang

berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

2. Kasubbag Keuangan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengatur kembali teknis pencairan dana sesuai aliran kas yang tersedia;
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan dengan Kabid-kabid, Kepala UPTD dan Sekretaris dalam proses pencairan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan,

2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tabel T-C.29)

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Tahun Berjalan) terlampir.

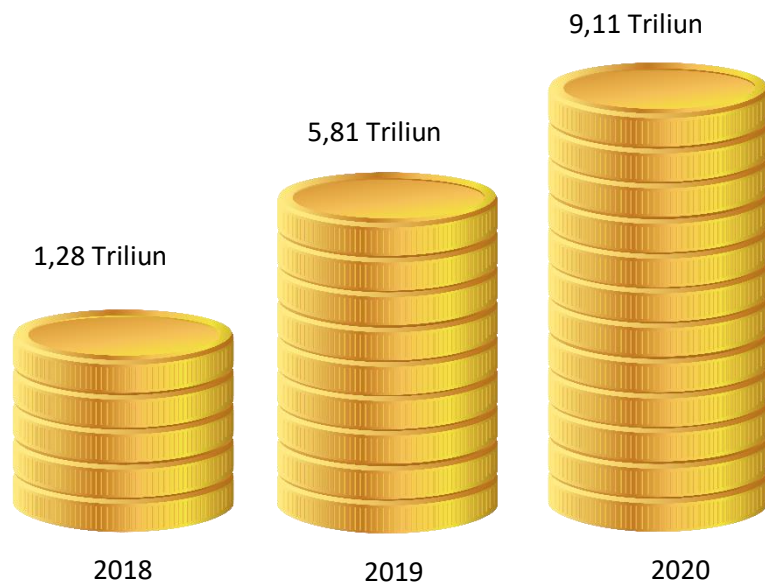
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Daerah

2.2.1 Kajian terhadap Capaian Kinerja berdasarkan Indikator NSPK, SPM dan IKK dan Indikator Kinerja lainnya

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang telah tertuang dalam RPJMA 2017-2022 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017-2022.

Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh menargetkan dalam RPJMA Realisasi Investasi sebesar Rp. 6,05 Triliun dan realisasinya sebesar Rp. 9,11 Triliun atau 150,60%, capaian realisasi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak Rp. 5,81 Triliun. Grafik peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai Investasi Aceh 2018-2020



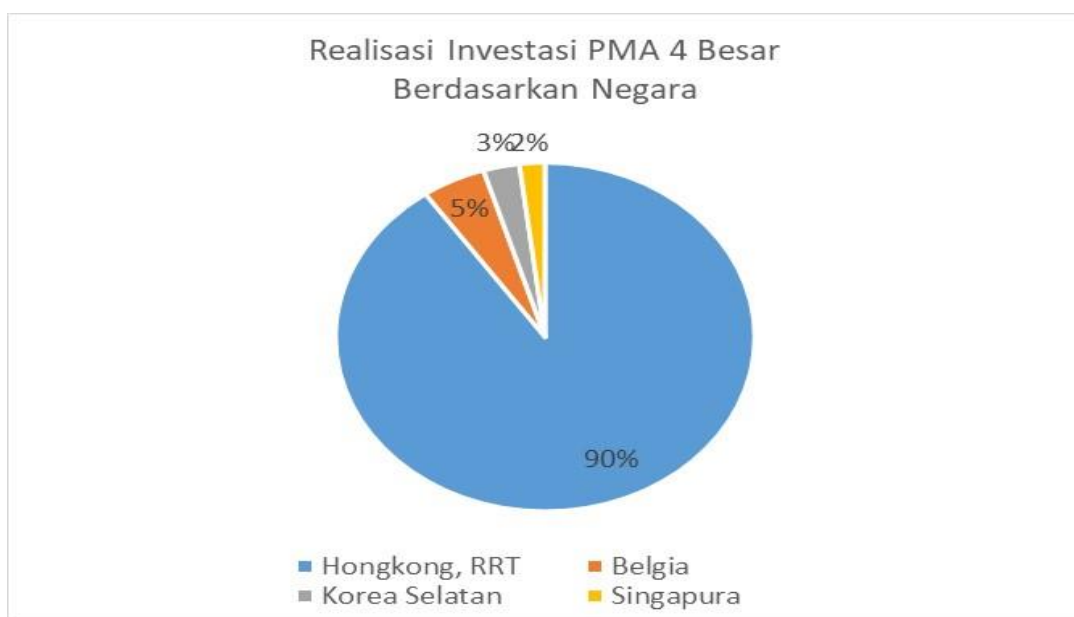
Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan SDM dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2020 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,37 T dengan jumlah perusahaan 520 yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 737 Milyar dengan jumlah perusahaan 61 yang menyampaikan LKPM. Total nilai realisasi investasi tahun 2020 ini Rp. 9,11 T dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.05 T dengan capaian 150,60% melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 10.201 dan 26 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:17.

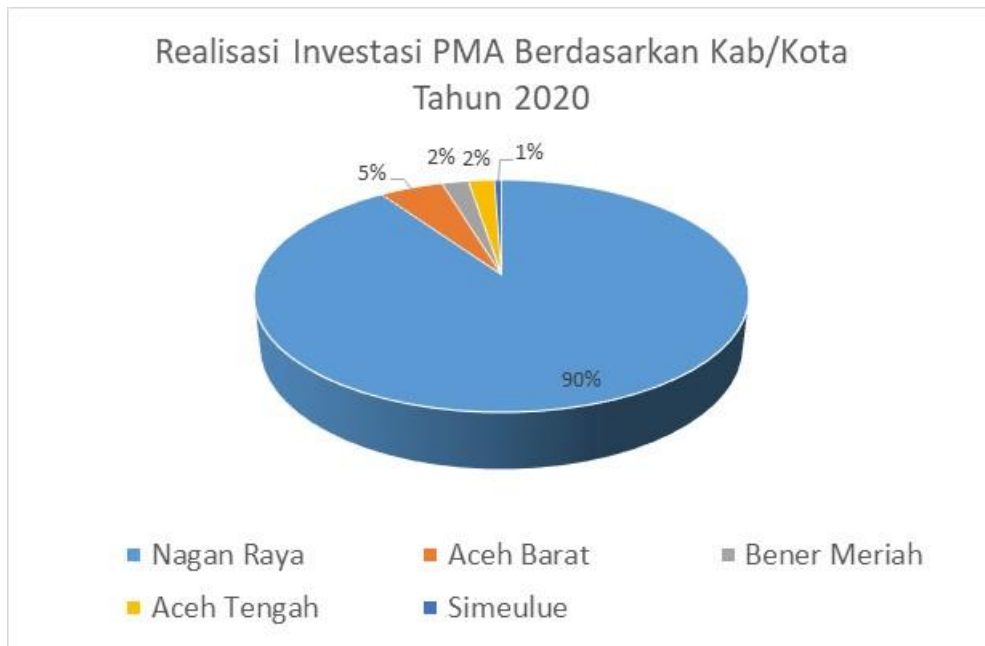
Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 45.156.410 US\$, Belgia sebesar 2.457.389 US\$, Korea Selatan sebesar 1.395.844 US\$, Singapura 984.308 US\$.

Gambar 2.2
Realisasi Investasi PMA 4 Besar Berdasarkan Negara



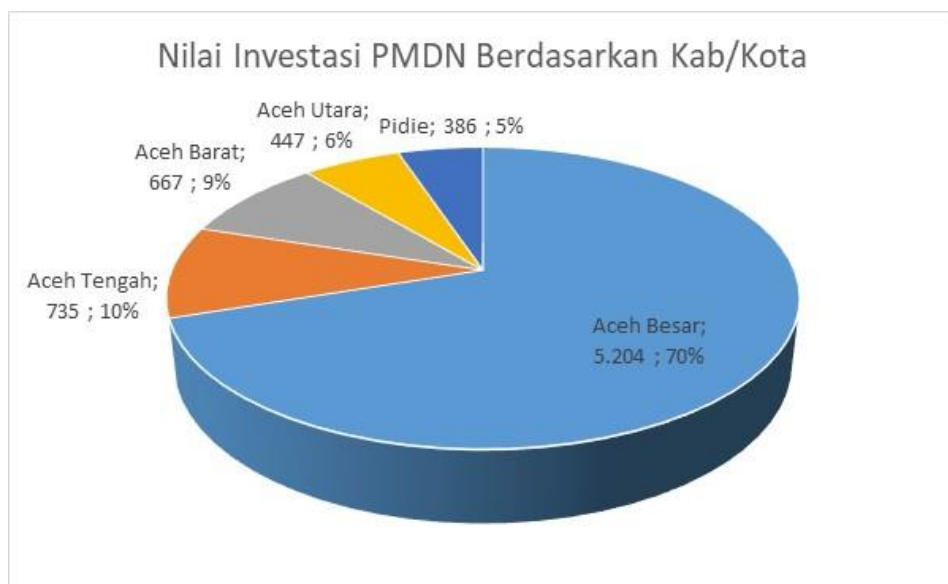
Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA lima besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 44.894.650 US\$, Aceh Barat 2.457.889 US\$, Kabupaten Bener Meriah 1.032.569 US\$, Kabupaten Aceh Tengah 1.012.254 US\$, Simeulue 271.776 US\$.

Gambar 2.3
Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2020



Sedangkan PMDN yaitu di Kabupaten Aceh Besar Rp 5.204 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp 735 miliar, Kabupaten Aceh Barat Rp. 667 miliar, Kabupaten Aceh Utara Rp. 447 miliar dan Kabupaten Pidie Rp. 386 miliar.

Gambar 2.4
Nilai Investasi PMDN Berdasarkan Kab/Kota



Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha lima besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 46.591.403 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 2.457.389 US\$, kehutanan 773.958 US\$, pertambangan 599.627 US\$, industri makanan 412.123 US\$. Sementara PMDN yaitu konstruksi Rp 5.053 miliar, listrik, gas dan air Rp. 803 miliar, pertambangan Rp.607 miliar, industri mineral non logam Rp. 512 miliar, dan industri makanan Rp. 496 miliar. Walaupun capaian kinerja 2020 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Linge Mineral Resources, PT. Nusa Sejahtera Energi, PT. Teumaron, PT. Singkil Sejahtera Makmur dll, dan perusahaan yang sudah di lakukan pengawasan antara lain : PT. Nia Yulided Bersama, PT. Damar Siput, PT. Parasawita, PT. Renggali Aceh Hotel.

Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini:

Gambar 2.5
Perkembangan Realisasi Investasi dari tahun 2017 s.d 2020



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami trend kenaikan positif, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan LKPM melalui SPIPISE.
- c. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing.
- d. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat-perangkat Daerah (Tabel T-C 30)

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut (terlampir).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Secara Umum, Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan Kabupaten/kota tidak jauh berbeda walaupun di beberapa nomenklatur terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur kegiatan terkait hal tersebut adalah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Secara vertikal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, karena diantara indikator Program BKPM-RI yang bersinergi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Dinas Penanaman Modal memiliki 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, program peningkatan Pelayanan Perizinan dan program perencanaan pembangunan ekonomi, sedangkan di BKPM-RI Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan indikator realisasi penanaman modal, rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa, rasio realisasi PMDN, hasil survey lembaga pemeringkat Internasional tentang peringkat kemudahan berusaha dan daya saing penanaman modal.

2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, terdapat beberapa tantangan yang dijumpai pada saat seminar atau pertemuan-pertemuan dengan *stakeholder* atau calon-calon penanam modal.

Tantangan merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/ organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa permasalahan dan hambatan yang ada dalam mencapai target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh adalah:

1. Kepastian hukum belum terwujud akibat masih adanya regulasi yang tidak selaras, baik di tingkat nasional maupun daerah;
2. Tidak meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor;
3. NSPK Kementerian/Lembaga terlambat dalam menerbitkan regulasi turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, sehingga mengakibatkan daerah juga terlambat melakukan penyesuaian regulasi yang mengacu kepada NSPK Pusat.
4. Belum semua kabupaten/ kota menerbitkan regulasi kemudahan berinvestasi;
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka pelayanan perizinan;
6. Kurangnya sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perbaikan iklim investasi

2.3.3 Uraian tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022, ditetapkan visi pembangunan Provinsi Aceh yaitu: “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani ”.

Visi ini mengandung tiga frasa kunci sebagai berikut:

- 1) Aceh yang Damai Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memantapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;
- 2) Aceh yang Sejahtera Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;
- 3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Misi sebagai berikut:

Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi

Misi 2 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah budaya dan nilai-nilai islami.

Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Melalui Misi 4 ini akan melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. Melalui Misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Aceh di tingkat nasional, regional dan internasional.

Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Misi 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritime

Misi 7 : Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbarukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar disektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainnya.

Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sistem informasi dan data-base Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai garda terdepan investasi di Aceh, menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi dan rasio daya serap tenaga kerja baik PMDN maupun PMA dan memberikan kemudahan perizinan bagi Investor dalam rangka mendukung Misi 1 Gubernur Aceh yaitu Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Adil, bersih dan melayani, Misi 8 membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industry kreatif dan kompetitif serta Misi 9 yaitu revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan Penanaman Modal di Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh menghadapi tantangan, antara lain:

- a. Data potensi informasi belum tersebar luas kepada para calon investor
- b. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
- c. Tingginya target realisasi investasi
- d. Target rasio penyerapan tenaga kerja yang kian meningkat
- e. Keterbatasan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan
- f. Kurangnya SDM yang handal dalam proses pelayanan perizinan dan investasi
- g. Investor belum dapat memanfaatkan fasilitas sewa lahan di kawasan industry dengan skema yang diminati.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Besarnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanaman modal dan perizinan
- b. Kondisi geografis Provinsi Aceh dan iklim yang baik, sangat mendukung investasi di sektor pariwisata, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan air tawar.
- c. Posisi geografis yang strategis pada jalur lintasan perdagangan nasional maupun internasional
- d. Infrastruktur transportasi yang mulai membaik

2.3.5 Formulasi Isu – Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan

Dengan menggunakan alat analisis SWOT, isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja DPMTSPSP Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas koordinasi pengembangan penanaman modal

Penguatan kapasitas koordinasi ini dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal yang diperkuat melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur untuk memastikan keterpaduan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diperlukan kelompok kerja yang merepresentasikan lintas sektor dan dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah yang bertanggung jawab ke Gubernur.

Ketimpangan wilayah dan sektor investasi dapat diperbaiki melalui peningkatan daya saing investasi di seluruh kabupaten/kota. Untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota pemetaan daya saing investasi di setiap kabupaten/kota sehingga

2. Pelaksanaan promosi penanaman modal secara tematik, berbasis target investor dan digital.

Efektifitas promosi penanaman modal dicapai melalui penyusunan prospektus proyek investasi yang siap ditawarkan (*investment project ready to offer*). Selain itu pelaksanaan promosi perlu dilakukan secara tematik dan fokus, terutama pada sektor yang potensial namun masih rendah realisasi investasinya. Pendekatan tematik dan fokus tersebut akan meningkatkan minat investasi di sektor-sektor yang timpang sehingga pemerataan investasi akan terjadi.

Selanjutnya, promosi juga perlu dilaksanakan dengan melakukan investigasi terkait kecenderungan calon investor melalui kegiatan *investment intelligence*. Dalam pelaksanaan promosi, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi promosi.

3. Optimalisasi perizinan secara digital, pasti dan tepat waktu.

Optimalisasi ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perizinan, penyusunan dan sosialisasi Standar Prosedur Operasi (SPO), pendampingan perizinan melalui klinik perizinan dan pengembangan system pemantauan perizinan (*permit tracking system*).

4. Pelayanan terhadap Investasi

Diskrepansi antara rencana investasi yang ditandai dengan permohonan izin dan realisasi investasi memiliki angka yang besar. DPMPTSP Aceh perlu melakukan pengawalan dan pelayanan bagi investor agar segera merealisasikan rencana investasi melalui kegiatan debottlenecking termasuk perubahan regulasi yang dianggap tidak pro-investasi.

5. Penguatan Data dan Informasi.

Data dan informasi merupakan suatu hal yang harus dikelola dengan baik sehingga adanya sebuah bidang yang mengelola data tersebut dan mempublikasikannya ke masyarakat yaitu Bidang Pengolahan data dan Informasi Penanaman Modal.

Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja DPMTSP Aceh Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan target rencana investasi dari informasi unsur kabupaten/kota menjadi sangat penting, selain itu penyusunan potensi investasi sektor dan daerah sebagai bahan promosi investasi dan informasi awal bagi calon investor.
2. NSPK Kementerian/Lembaga terlambat dalam menerbitkan regulasi turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, sehingga mengakibatkan daerah juga terlambat melakukan penyesuaian regulasi yang mengacu kepada NSPK pusat.
3. Kegiatan kemitraan UMKM dan perusahaan terus dilakukan mengingat adanya kewajiban investor untuk bermitra dengan UMKM sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Saat ini telah dibentuk UPTD Administrator Kek Arun lhokseumawe berdasarkan Pergub 17/2020.
5. Proyek Investasi yang clean dan clear (ready to offer), Penguatan Materi Promosi
6. Perlu penguatan kapabilitas SDM dalam rangka peningkatan capaian Realisasi Investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMA.
7. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penanaman modal yang lebih inovatif.
8. Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Provinsi Aceh berbasis system aplikasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Perencanaan yang baik membutuhkan perhatian yang jeli terhadap perkembangan yang terus berubah. Akibatnya, penyesuaian rencana kerja patut dilakukan guna memastikan visi dan misi organisasi tercapai. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melakukan berbagai perbaikan perencanaan melalui peninjauan kembali rencana awal yang telah dibuat.

2.4.2 Uraian Tentang Alasan Perbandingan Tersebut Dilaksanakan

Selanjutnya kesenjangan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolok ukur kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pagu pada setiap program/kegiatan lembaga sesuai dengan kebutuhannya, sehingga Perangkat Daerah dapat menjalankan program dan kegiatannya dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan penting jika terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja

Rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, MELIPUTI KEGIATAN:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan di atas tidak ada catatan penting atau perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.4.4 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun yang di Rencanakan (Tabel T-C.31)

Tabel T-C 3.1 (terlampir) memperlihatkan kondisi awal RKPA dan analisis kebutuhan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam bidang penanaman modal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

2.5.1 Uraian tentang proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Pada tanggal 25 Februari 2021 ada usulan dari Walikota Langsa tentang permohonan Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung DPMPTSP Kota Langsa kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan suratnya ke Ketua DPRK Kota Langsa c.q. Komisi III Kota Langsa, DPMPTSP Aceh dan Kepala Bappeda Kota Langsa dengan melampirkan RAB dan DED Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor.

Pada Musrembang Kabupaten Kota yang dilaksanakan di Bappeda Aceh Kabupaten Aceh Tamiang ada mengusulkan DED Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tamiang dan pada Rapat Itu dihadiri oleh Kepala DPMPTSP Aceh Tamiang, Kepala Bappeda Aceh Tamiang dan didukung penuh Oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang. Usulan tersebut disetujui dan didukung penuh oleh Kepala DPMPTSP Aceh dan Ketua DPRK Aceh Tamiang, saat ini usulan tersebut sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Tahun 2022 melalui Dinas PU Kabupaten Aceh Tamiang.

2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan tersebut dengan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Mall Pelayanan Publik dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Untuk itu usulan dari DPMPTSP Aceh Tamiang sangat di dukung oleh DPMPTSP Aceh untuk bisa terwujud pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tamiang. Ketua DPRK Aceh Tamiang berjanji untuk mengawal hingga terbangunnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga masyarakat akan dipermudah segala urusan dalam satu tempat.

2.5.3 Tabel Usulan Program/Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun direncanakan (Tabel T-C.32)

Tabel T-C. 32 tentang usulan Program/kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun direncanakan (Terlampir)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Uraian Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Konsistensi kebijakan investasi harus dipastikan didalam dokumen perencanaan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal. Dari sisi kebijakan nasional, Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memberikan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. 5 arahan tersebut adalah 1). Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2). Pembangunan Infrastruktur; 3). Penyederhanaan Regulasi; 4). Penyederhanaan Birokrasi; dan 5). Transformasi Ekonomi.

Kesemua arahan tersebut merupakan faktor daya saing dan daya Tarik investasi di Indonesia. Secara spesifik, investasi menjadi prioritas dalam agenda pembangunan pertama yang ditetapkan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Agenda ini menempatkan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata.

Dalam RPJMN 2020-2024, Investasi diharapkan sebagai pendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi. Selama kurun waktu 2020-2024, Ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh dalam kisaran 5,7-6,0 persen. Selanjutnya, untuk memungkinkan pencapaian tersebut, pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto-PMTB) diharapkan tumbuh 6,6 – 7,0 persen. Pencapaian target pertumbuhan investasi diraih melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, mewujudkan kepastian hukum dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Rencana Umum Pengembangan Penanaman Modal (RUPM) Aceh Periode 2014-2025 ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2014. RUPM memiliki 8 arah kebijakan yaitu : 1). Perbaikan Iklim Penanaman Modal, 2) Persebaran Penanaman Modal, 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal; 5) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); 6) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

7) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan 8). Promosi Penanaman Modal. Dari sisi pentahapan, periode saat ini memasuki fase ke-tiga (2020-2025), yaitu Pengembangan Industri Berdaya Saing dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry). Terdapat 3 fokus industri yang menjadi sasaran investasi, yaitu agroindustry, infrastruktur dan energi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Periode 2017-2022 ditetapkan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Visi Pembangunan Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Untuk melaksanakan visi tersebut, terdapat 10 misi yang harus dilaksanakan; yaitu: 1). Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani; 2). Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlus sunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.; 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki; 4). Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional; 5). Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi; 6).Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; 7). Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan; 8). Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif; 9). Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence-based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan; 10). Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam operasionalisasi RPJMA 2017-2022, Pemerintah Aceh menetapkan 15 Program Unggulan yang disebut dengan Program Aceh Hebat.



Gambar 3.1. Program Unggulan dalam RPJMA 2017-2022

Secara spesifik, Arah kebijakan penanaman modal di RUPM berada pada lintas misi dan program unggulan. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal merupakan agenda pembangunan untuk misi pertama RPJMA dan program Aceh Peumulia. Selanjutnya, relevansi RUPM dan RPJMA serta Program Unggulan Aceh Hebat dapat dilihat dari tabel berikut :

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022, Pemerintah Aceh memiliki tema “Pemulihan ketahanan ekonomi dengan fokus pengembangan agroindustri, pemberdayaan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan”.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022 disusun dalam konteks maraknya pandemi COVID 19 sehingga fokus kebijakan pemerintah Aceh pada tahun 2022 adalah pemulihan pembangunan yang terdampak oleh wabah virus ini. Prioritas Pembangunan Aceh tahun 2022 adalah: 1). Mendorong pemulihan Agroindustri dan Pemberdayaan UMKM; 2). Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing; 3). Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan; dan 4). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Rencana Pengembangan Penanaman Modal (RP2M) Tahun 2022 akan menjadikan kebijakan perencanaan daerah di dalam RUPM 2014-2020, RPJMA 2017-2022 dan RKPA 2022 sebagai dasar perencanaan penanaman modal Aceh di tahun 2022, terutama mendorong penanaman modal berkontribusi pada pencapaian tujuan prioritas Pembangunan Aceh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

3.2.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan Sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Thread) dari isu strategis yang diidentifikasi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra) Tahun 2017-2022, diperoleh lima strategi yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja penanaman modal di tahun 2022, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan penanaman modal.

Kualitas dan pelayanan penanaman modal perlu ditingkatkan dengan prinsip kemudahan, kecepatan dan kepastian (*ease of doing business*). Perkembangan teknologi digital dan kondisi pandemi Covid 19 mendorong proses transformasi digital makin cepat dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan penanaman modal. Sosialisasi aturan dan persyaratan hingga pengurusan perizinan berbasis online merupakan salah satu inovasi yang harus dilakukan pada tahun 2022. Selain itu, strategi promosi menggunakan teknologi digital seperti webinar atau virtual expo adalah pilihan yang lebih murah dan efektif dibanding dengan pendekatan tradisional yang menekankan pada kehadiran fisik (*physical presence*).

Selain itu informasi potensi dan peluang investasi perlu dikemas dengan menarik sehingga menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan (*investment project ready to offer*) sehingga memudahkan calon investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Baik Calon Investor dan Investor yang sudah ada (*existing*) perlu dilayani secara baik agar dapat segera merealisasikan dan mengembangkan proyek investasi yang sudah ada. Konsep *Customer/Investor Relationship Management* merupakan hal yang krusial dilakukan yang didukung oleh Sistem Informasi Penanaman Modal yang berbasis digital dan daring.

2. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan dan sektor strategis

Berdasarkan prinsip halal dan hijau Hilirisasi merupakan tema utama dari pembangunan ekonomi Aceh. Sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal. Bahwa Ekonomi Aceh diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Aceh memiliki komoditas unggulan yang memiliki kualitas tinggi sehingga peningkatan produktivitas dan nilai tambah akan dapat menyejahterakan rakyat Aceh secara efektif. Sektor strategis investasi yang dimaksud adalah sektor pangan, bioteknologi/bio-farmaka dan sektor teknologi digital (*e-commerce*).

Untuk mendorong hilirisasi melalui penanaman modal, beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya Menyusun peta hilirisasi untuk komoditas unggulan daerah, meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan, mengembangkan kapasitas dan skala usaha serta daya saing UKM/IKM di dalam rantai nilai komoditas unggulan dan sektor strategis, mempromosikan peluang investasi terutama pada rantai

nilai komoditas unggulan dan sektor strategis yang masih belum ada, dan melakukan fasilitasi perluasan pasar baik domestik dan ekspor. Aceh sebagai provinsi Syariah memiliki kewajiban untuk memastikan segala produksi yang dilakukan di provinsi ini telah mengikuti prinsip-prinsip halal sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Apalagi pangsa pasar produk halal atau ekonomi halal di dunia mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tematik halal dapat menjadi sumber daya saing bagi Aceh dalam menarik investasi. Untuk itu, memastikan proses dan produk bersertifikasi halal hingga penyediaan instrumen investasi berbasis syariah merupakan sebuah prioritas.

Dunia telah meratifikasi komitmen pembangunan global, yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan pembangunan ini berjumlah 17. Investasi atau penanaman modal dimandatkan pada tujuan 1 (Pengurangan Angka Kemiskinan - Zero Poverty), Tujuan 2 (Pengurangan Angka Kelaparan-Zero Hunger), Tujuan 7 (Energi Bersih), Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan Tujuan 17 (Kemitraan Internasional). Untuk 27 memobilisasi dana global, diperlukan perluasan informasi peluang dan investasi hijau di Aceh bagi donor atau investor hijau. Dalam melaksanakan strategi ini, dapat dilakukan kemitraan atau kolaborasi dengan Lembaga non-pemerintah dan Universitas yang bergerak di sektor investasi hijau.

3. Membangun Infrastruktur Pendukung Investasi

Pembangunan Infrastruktur ditujukan untuk memudahkan dan mendorong produktifitas dan nilai tambah serta efisiensi dari sebuah proses penanaman modal. Infrastruktur pendukung investasi berupa infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, Pelabuhan dan bandara udara serta telekomunikasi. Selanjutnya infrastruktur yang mendorong produktifitas komoditas seperti irigasi dan infrastruktur energi serta air bersih juga perlu terus dibangun. Pembangunan infrastruktur ini akan membuat investasi lebih feasible sehingga dapat menarik minat investor. Selain itu juga pembangunan infrastruktur diatas akan meningkatkan kualitas hidup yang akan menarik juga talent atau SDM yang dibutuhkan dalam proses investasi.

4. Meningkatkan iklim Ketenagakerjaan yang kondusif

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif merupakan salah satu penarik investasi. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan keterampilan melalui

pelatihan, sertifikasi dan pemagangan (3in1) berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri/investasi (DUDI) merupakan hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya, pelaksanaan (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh DUDI juga dapat diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui 3in1 diatas.

Selain itu, Pemerintah Aceh perlu mendorong hubungan industrial yang harmonis antara Investor dan pekerja melalui sosialisasi ketentuan ketenakerjaan baik kepada investor dan pekerja. Peningkatan layanan ketenagakerjaan tentang tenaga kerja asing juga perlu dilaksanakan dengan mempedomani aturan ketenakerjaan yang berlaku.

5. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Investasi

Saat ini Aceh memiliki 4 Kawasan Peruntukan Investasi yang relative clear and clean dalam menerima investasi. 4 Kawasan tersebut adalah KEK Arun Lhokseumawe, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo. Pengembangan Kawasan ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur dalam Kawasan dan luar Kawasan dan pengembangan kelembagaan pengelola 4 kawasan tersebut. Selain 4 kawasan tersebut, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan Kawasan peruntukan investasi lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh mengamanatkan pembangunan 3 (tiga) Kawasan industri, 6 (enam) sentra industry kecil dan menengah dan Kawasan-kawasan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berbasis korporasi. Kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi lokasi prioritas dalam menarik investasi dalam rangka hilirisasi ekonomi Aceh.

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan target dan strategi yang telah ditetapkan, program, kegiatan dan subkegiatan dan prioritas pada tahun anggaran 2022 selengkapnya dapat dilihat pada bagian Lampiran 1. Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merencanakan 6 (enam) program terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja SKPA ini pada tahun kelima RPJM Aceh Tahun 2017-2022 dapat memberi manfaat bagi perbaikan citra Aceh sebagai salah-satu daerah tujuan investasi di Indonesia. Diharapkan sejalan dengan itu terjadi pula peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2022.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin adalah

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyusunan dokumen perencanaan dengan beberapa sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa surat-menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi
 3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan kegiatan Promosi Penanaman Modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan dan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Non Perizinan penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6. Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal**
- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengelola data dan sistem informasi penanaman modal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
(TABEL TERLAMPIR)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh Pemerintah Aceh dalam Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai target realisasi investasi di tahun 2022 sebagaimana telah diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.

Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai benchmarking dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Namun harus dipahami bahwa realisasi investasi merupakan akumulasi dari berbagai faktor dan kontribusi, termasuk kontribusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Gampong. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 hanya mencakup rencana intervensi dari Pemerintah Aceh. Kedepan, dapat disusun dengan melibatkan pihak lintas tingkat pemerintahan sehingga integrasi dapat terjadi dan menambah kekuatan atau efektifitas program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan untuk menarik investasi di Aceh.

5.2 Catatan Penting yang perlu mendapatkan Perhatian

Keterkaitan kinerja antar-tahun anggaran dapat dilihat melalui laporan kinerja akhir tahun. Karena itu, Rencana Kerja ini dapat menjadi salah-satu alat evaluasi terhadap target dan realisasi kerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal yang sangat penting adalah bahwa dunia usaha dan masyarakat luas dapat terus memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh guna peningkatan nilai realisasi investasi Aceh. Diharapkan agar keluaran (*output*) Rencana Kerja pada tahun kelima RPJM Aceh Tahun 2017-2022 ini memberi manfaat nyata (*outcome*) bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh di masa mendatang.

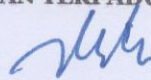
5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2022 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022 melalui

koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2022. RKA yang telah disetujui oleh TAPA dan DPRA dalam pembahasan RAPBA akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagai penjabaran dari APBA Aceh tahun 2022.

Banda Aceh, 13 Juli 2021

**★ KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH ♀**



Marthunis, ST, D.E.A.

Pembina Tk. I

Nip. 19770805 200312 1 005

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah nilai realisasi investasi.	Jumlah nilai realisasi investasi.	5,500,000,000,000 rupiah	6,050,000,000,000 rupiah	6,650,000,000,000 rupiah	7,300,000,000,000 rupiah	5,812,090,744,108 rupiah	4,953,957,949,861 rupiah	6,650,000,000,000 rupiah	7,300,000,000,000 rupiah	
3	Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM.	Jumlah penanam modal asing / dalam negeri.	670 perusahaan	805 perusahaan	965 perusahaan	1,159 perusahaan	446 perusahaan	808 perusahaan	965 perusahaan	1,159 perusahaan	
4	Rasio daya serap tenaga kerja.	Rasio daya serap tenaga kerja.	1:65	1:70	1:75	1:80	1:29	0	1:75	1:80	
5	Jumlah peserta dan aparaturnya Sosialisasi sistem informasi dan potensi daerah		64 orang	-- orang	24 orang	24 orang	64 orang	0 orang	24 orang	24 orang	
6	Jumlah peserta Sosialisasi e-perizinan Kab/Kota, sinkronisasi data penanaman modal dan database terintegrasi Kab/kota serta workshop multi media		150 orang	70 orang	70 orang	70 orang	77 orang	0 orang	70 orang	70 orang	
7	Jumlah peserta Kursus, Pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kursus-kursus singkat		36 orang	0 orang	24 orang	24 orang	24 orang	2 orang	24 orang	24 orang	
8	Frekuensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Renja dan laporan lakip		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %	100 %	100 %	
9	Koordinasi, Konsultasi, Supervisi Perencanaan Penganggaran dan Musrenbangnas		15 kali	6 kali	6 kali	6 kali	13 kali	0 kali	14 kali	14 kali	
6	Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.		0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
7	Frekuensi pemantauan perusahaan penanaman modal.		25 kali	38 kali	38 kali	38 kali	16 kali	0 kali	58 kali	58 kali	
8	Frekuensi pengawasan perusahaan penanaman modal.		19 kali	34 kali	34 kali	34 kali	12 kali	0 kali	44 kali	44 kali	
9	Frekuensi pembinaan perusahaan penanaman modal.		28 kali	28 kali	28 kali	28 kali	16 kali	0 kali	45 kali	45 kali	
10	Frekuensi fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal.		4 kali	5 kali	5 kali	5 kali	1 kali	0 kali	2 kali	2 kali	
11	Frekuensi publikasi informasi Media cetak serta terkait LKPM.		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0 kali	4 kali	4 kali	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Jumlah kegiatan promosi investasi.		7 kali	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	0 kali	11 kali	11 kali	
13	Misi Investasi/Kerjasama kawasan		0 Kali	9 kali	9 kali	9 kali	5 Kali	2 Kali	9 kali	9 kali	
14	Jumlah buku Aceh Investment		1,500 buah	2,000 buah	2,000 buah	2,000 buah	800 buah	0 buah	2,000 buah	2,000 buah	
15	Jumlah leaflet Investasi.		2,000 lembar	2,000 lembar	2,000 lembar	2,000 lembar	900 lembar	0 lembar	2,000 lembar	2,000 lembar	
16	Publikasi baliho investasi		50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	50 buah	0 buah	50 buah	50 buah	
17	Jumlah Goodle Bag		2,000 buah	2,000 buah	2,000 buah	2,000 buah	1,000 buah	0 buah	2,000 buah	2,000 buah	
18	Publikasi video promosi investasi dan video presentasi sosialisasi kemudahan berusaha		2 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0 Paket	0 Paket	1 paket	1 paket	
21	Jumlah buku regulasi penanaman modal.		0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	70 buah	0 buah	85 buah	85 buah	
22	Jumlah buku Dokumen Perencanaan		0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	50 buah	0 buah	0 buah	0 buah	
23	Jumlah Qanun Penanaman Modal		0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	1 buah	0 buah	0 buah	0 buah	
24	Jumlah Buku Direktori UMKM Potensial Aceh		0 buah	0 buah	0 buah	0 buah	70 buah	0 buah	0 buah	0 buah	
25	Frekuensi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal Aceh.		0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	
26	Jumlah peserta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal Aceh.		0 orang	115 orang	115 orang	115 orang	105 orang	0 orang	115 orang	115 orang	
27	Jumlah peserta Rapat perencanaan pengembangan kawasan (KPBPB, KEK, KI) di Aceh		0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0 orang	50 orang	50 orang	
28	Frekuensi fasilitas kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	
29	Jumlah peserta fasilitas kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, BUMD/BUMN		53 orang	55 orang	55 orang	55 orang	0 orang	0 orang	55 orang	55 orang	

No	Indikator Kinerja Utama Tipe Pengukuran (Output)	Target 2021	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Kelebihan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	30	11	12	13	14
11	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0 orang	100 orang	100 orang	100 orang
12	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	0 orang	0 orang	40 orang	40 orang	40 orang
13	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	0 buku	4 buku	4 buku	4 buku	1 buku	0 buku	4 buku	4 buku	4 buku
14	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	50 orang	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 orang	0 orang	0 buku	0 buku
15	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	24 orang	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang
16	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	30 buku	20 buku	30 buku	30 buku	30 buku	0 buku	30 buku	30 buku	30 buku
17	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	0 buku	2 buku	2 buku	2 buku
18	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang
19	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	30 orang	0 orang	60 orang	60 orang	60 orang
20	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	350 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan	350 buku/hari/tan	350 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan	450 buku/hari/tan
21	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	1.000 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan	1.000 buku/hari/tan	1.000 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan	300 buku/hari/tan
22	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	0 orang	0 orang	30 orang	30 orang	30 orang
23	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0 orang	50 orang	50 orang	50 orang
24	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	350 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan	350 buku/hari/tan	350 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan	650 buku/hari/tan
25	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
26	Berikutnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bada Aceh	4	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Kepala Dinas Perikanan, Monev dan
Pelayanan Masyarakat Kota Banda Aceh
[Signature]
Mestika ST, DEA
Pembina Tk. I
NIP. 1970905 200312 1 005

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2022
Provinsi Aceh

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Rancangan Awal RKPA						Kode	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (Rancangan Akhir RKPA)														
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting									
(1)	(2)	(3)	(4)	5	6		7	8	9	10	11	12	13									
Total						#REF!	Total						#REF!									
2	18	01			Rp 30,398,025,837	2	18	01				Rp 29,112,101,584										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																						
2	18	01	1.01		Rp 276,542,000	2	18	01	1.01			Rp 197,676,000										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	1	Dokumen	Rp 1,700,000	2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	1	Dokumen	Rp 97,556,000	
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Tersedianya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPPTSP tahun 2022	6	Dokumen	Rp 263,077,000	2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Tersedianya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPPTSP tahun 2022	6	Dokumen	Rp 90,545,000	
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKIP/LAKIP, Rekam Jejak	5	Dokumen	Rp 11,765,000	2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPJ, LKIP/LAKIP, Rekam Jejak	5	Dokumen	Rp 9,575,000	
2	18	01	1.02		Rp 21,956,422,810	2	18	01	1.02			Rp 20,790,481,473										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	14	Bulan	Rp 19,849,458,310	2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersedianya Iuran Jaminan/Asuransi bagi Non ASN, Tersedianya	12	Bulan	Rp 18,344,610,473	
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Terpenuhi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Terpenuhi pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 orang		Rp 1,960,090,000	2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Tersedianya Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	Bulan	Rp 2,205,355,000	
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LQ)	1	Dokumen	Rp 120,782,500	2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	Rp 216,614,000	
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Buku Besar, Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	24 buku		Rp 26,092,000	2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Laporan Akhir Tahun serta Blanko SPM, Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban	114 buah	buku	Rp 23,902,000	
2	18	01	1.05		Rp 364,157,600	2	18	01	1.05			Rp 183,205,000										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Tersedianya Pakaian Dinas	166 stel		Rp 119,905,600	2	18	01	1.05	02	-						
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan kursus-kursus	18 orang		Rp 244,252,000	2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh, Jakarta	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Penjurusan, Kerjasama Bimtek dan kursus-kursus Singkat	10 orang	200 orang	Rp 183,205,000	
2	18	01	1.06		Rp 2,772,190,771	2	18	01	1.06			Rp 1,526,111,003										
Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	12	Bulan	Rp 41,420,600	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	12	Bulan	Rp 38,140,692	
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Sewa Gudang, LED Videotron di Spg, Surabaya	12	Bulan	Rp 1,530,000,000	2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket Unit	Rp 711,272,710	
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12	Bulan	Rp 423,363,991	2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	1000 Porsi	Rp 346,815,241
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	Rp 301,416,180	2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat serta tamu	12	Bulan	150 Pack	Rp 202,864,360
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	12	Bulan	Rp 37,920,000	2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	Rp 37,920,000	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	Rp 438,070,000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Terpenuhi Informasi Terkini dan terupdate melalui media cetak	12	Bulan	Rp 37,920,000	
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Mengikuti Rapat Koordinasi dan Pendampingan Tamu ke Daerah	9	Kali	Rp 189,098,000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Mengikuti Koordinasi, Konsultasi, Sinkronisasi Data/Program, Rapat-rapat dan Pendampingan Tamu ke Daerah	9	Kali	Rp 189,098,000	

2	18	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp	2,565,293,000	2	18	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp	5,237,696,526
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedian Ruang Rapat	1 Ruang Rapat	Rp	2,565,293,000	2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Telaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMP/TSP Tersedianya Konsultansi Pengawas Bangunan Gedung Kantor	1 Paket 1 Paket	Rp	5,237,696,526
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	1,436,008,804	2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	636,302,700
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Perangkat, materi dan benda pos lainnya; Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	4000 lembar 1200 kg	Rp	78,800,000	2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya Tersedianya Perangkat, Materi, Wesel Pos dan Pos Lainnya	800 Kg 2000 Lembar	Rp	47,200,000
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Belanja Telepon, air, listrik dan kawat faximili/internet	12 Bulan	Rp	674,457,750	2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Anggaran untuk Tagihan Telepon, Listrik, Speedy/Internet dan Tagihan Air	12 Bulan	Rp	471,357,750
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107); Sarung Tangan Fortune Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah; Jasa Cleaning Service (Pihak Ketiga)	300: botol; 87; kotak 22; pack; 2; kali; 1 paket	Rp	682,751,054	2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107) Tersedianya Belanja Peralatan Pembersih Kantor Tersedianya Anggaran untuk Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah - Tipe A dan Jasa Keamanan Lingkungan Tersedianya Sarung Tangan Plastik	250 botol 1 Paket 2 Jasa 87 Kotak	Rp	117,744,950
2	18	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	1,027,410,852	2	18	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp	540,628,882
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Terpelihara dan terbayarnya pajak mobil dinas; Terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan roda 2;	23; unit; 11: unit	Rp	848,678,498	2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Tersedianya Anggaran Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	34 unit 8 unit 8 Unit	Rp	429,859,000
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp	178,732,354	2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp	110,769,882
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Rp	1,537,486,041	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Rp	633,600,000
2	18	02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Rp	474,779,000	2	18	02	1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					Rp	192,380,898
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1. Tersusunnya Rancangan Awal Peraturan Deregulasi Penanaman Modal 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan deregulasi penanaman modal	1 Ranpergub 60 Peserta	Rp	213,505,000	2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	Sosialisasi peraturan derregulasi penanaman modal Tersusunnya Kajian Regulatory Impact Assessment	40 Peserta 1 Kajian	Rp	63,415,898
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	1. Rekomendasi Perubahan Kebijakan Deregulasi Penanaman Modal. 2. Terpetaknya Indeks Daya Saing Tahun 2022 di Provinsi dan di seluruh Kab/Kota di Aceh,	1 Dokumen 1 Dokumen	Rp	261,274,000	2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tengah; Kota Banda Aceh; Kota Lhokseumawe	Terpetaknya dokumen Indeks Daya Saing Tahun 2022 di Provinsi Aceh dan di 23 Kab/Kota Tersedianya rekomendasi perubahan kebijakan penanaman modal	1 Dokumen 1 Rekomendasi	Rp	128,965,000
2	18	02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					Rp	1,062,707,041	2	18	02	1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					Rp	441,219,102
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kota Banda Aceh	1. terlaksananya Investment Planning Forum 2. Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan Wilayah, 3. Tersusunnya revisi RUPM Aceh 4. Sosialisasi Penyusunan	100 Urang 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp	340,734,347	2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Tengah; Kota Banda Aceh; Kab. Aceh Tamiang	Terlaksananya Investment Planning Forum Aceh Terlaksananya penyusunan rencana pengembangan penanaman modal sektor usaha dan wilayah Tersusunnya rencana strategis penanaman modal tahun 2022-2026	100 Peserta 1 Dokumen 1 Dokumen	Rp	194,039,102

2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Kota Banda Aceh	1. Tersusunnya Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal 2. Penyusunan Prospektus Investasi 3. Tersedianya UKM yang siap bermitra dengan PMA/PMDN 4. Terlaksananya temu usaha antara UKM dengan PMA/PMDN (Investor Pitch Deck)	23 Dokumen 2 Prospektus 4 UKM 50 Peserta	Rp 721,972,694	2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Utara; Kota Banda Aceh; Kab. Aceh Tamiang	Penyusunan prospektus investasi Tersedianya prospektus UMKM Tersusunnya pemetaan potensi dan peluang penanaman modal	2 Prospektus 4 UKM 23 Dokumen	Rp 247,180,000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp 5,403,000,617	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp 1,550,822,720
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp 5,403,000,617	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp 1,550,822,720
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Banda Aceh, Aceh Tengah, Sabang, Pulau Banyak-Singkil	1). Terlaksananya Seminar Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 2). Penyusunan Analisa Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 3). Terlaksananya FGD Penyusunan Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh Berdasarkan Negara dan Kawasan (2x); 4). Tersusunnya Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target Dan Analisis Daerah Pesaing; 5). Terselenggaranya FGD Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing (2x); 6). Terlaksananya Seminar Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing;	35; Org; 4; Dok. Kajian; 80; Org; 6; Dok Kajian; 100; Org; 50; Org;	Rp 2,234,232,666	2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Tersedianya Kajian Analisis Investment Intelligence - Analisis Berdasarkan Negara Target Terselenggaranya Koordinasi dan Promosi Investasi	1 Dokumen 2 Kegiatan	Rp 512,141,083
2	18	3	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Banda Aceh, Jakarta, India, UEA, China	Terlaksananya Keg. Promosi Investasi Aceh melalui Pameran dan Business Forum, publikasi melalui media cetak, sosial dan elektronik dan kegiatan promosi lainnya	10 Event Promosi (Pameran dan Bisnis Forum) 4 Publikasi melalui media cetak 50 Publikasi melalui Media Online Platform Media Sosial 4 Video Promosi Investasi Aceh Sistem dan Perangkat Promosi Digital (Website, CRM dan Kios Digital)	Rp 3,168,767,951	2	18	3	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Terlaksananya Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Sosial Tersedianya Materi/Bahan Promosi Investasi Aceh	1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Dokumen	Rp 1,038,681,637

2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp	3,334,120,904	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp	1,314,155,696
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp	3,334,120,904	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Rp	1,314,155,696
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Lhokseumawe	Terlaksananya -Pelatihan pengembangan capacity building staf; Sosialisasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK; Pelatihan OSS; Pelatihan Aplikasi SiCantik CCloud; Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus.	40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 15 Izin/ Non Izin 1 SK Masterlist	Rp	1,000,000,000	2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Lhokseumawe	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Perizinan, Nonperizinan, Fasilitas dan Kemudahan Investasi di KEK Arun Lhokseumawe	12 Bulan	Rp	200,123,000
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Banda Aceh	Jumlah izin dan non izin A, B dan C, Jumlah Peserta	555 396 Izin dan non izin 3,83 5	Rp	1,562,829,950	2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Banda Aceh	Kegiatan rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Penyelesaian Izin Bidang A Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen	45 Orang 45 Orang 45 Orang 555 Izin dan Non Izin	Rp	727,908,796
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	kab/kota, langsa	1)Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu; 2)Terlaksananya Bimtek Tata Cara Penanganan Kasus, 3) Sosialisasi dan Pembinaan PTSP Kab/Kota, 4) Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Pendampingan e-perizinan pada klinik perizinan, 5)Terlaksananya Monev Perizinan dan Non Perizinan, 6)Rapat Kerja PTSP, 7) Tersusumnya Buku IKM, 8)Terlaksananya Sosialisasi SOP dan SP, 9) Terlaksananya Bimtek Front Office, 10) Terlaksananya in house training terhadap petugas perizinan DPMPPTS	9, kasus 50 orang 10 Kab/Kota 1 Kegiatan 45 Izin/Non Izin 30 Orang 1 Buku 50 orang 50 orang 50 orang	Rp	771,290,954	2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tengah; Kab. Aceh Tenggara; Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Utara; Kab. Bireuen; Kab. Pidie; Kab. Simeulue; Kota Banda Aceh; Kota Sabang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe ; Kab. Nagan	Terlaksananya Bimtek Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Terlaksananya Bimtek E-Perizinan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perizinan dan non perizinan ke kab/kota Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan PTSP Kab/Kota Terlaksananya Sosialisasi SOP dan SP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tersusumnya Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertanganinya Kasus Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	120 Orang 100 Orang 30 Izin/Nonizin 8 Kab/Kota 50 Orang 2 kali 9 Kasus	Rp	386,123,900

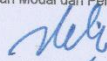
Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Aceh

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penyusunan DED Gedung MPP Aceh Tamiang	Desa Bundar, Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang	Tersedianya Penyusunan DED Gedung MPP Aceh Tamiang	1 Dokumen	Pagu = Rp. 950.000.000,- Usulan DPMPPTSP Kab Aceh Tamiang
2	Pembangunan Gedung DPMPPTSP Kota Langsa	Jln. P.Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa	Tersedianya Pembangunan Gedung DPMPPTSP Kota Langsa	1 Paket	Pagu = Rp. 2.400.000.000,- Usulan DPMPPTSP Kota Langsa
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung DPMPPTSP Kota Langsa	Jln. P.Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa	Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung DPMPPTSP Kota Langsa	1 Paket	Pagu = Rp. 1.200.000.000,- Usulan DPMPPTSP Kota Langsa

Banda Aceh, 13 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh ♀



Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I

NIP. 19770805 200312 1 005

TABEL T.C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPSTP ACEH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023																																																			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja																																																	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)																																															
2																																																													
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																																													
2	18																					Rp	33,625,000,000						Rp	36,987,500,000																															
2	18	01																													Rp	29,112,101,584						Rp	32,023,311,742																						
2	18	01	1.01																																			Rp	197,676,000						Rp	217,443,600															
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Dokumen Rencana kerja	Tersusunnya Renja	Banda Aceh	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen		DAU																									Rp	97,556,000								Rp	107,311,600												
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPSTP tahun 2022	Tersusunnya RKA dan DPA Revisi 2021, RKA dan DPA Perubahan Tahun 2021 dan RKA dan DPA DPMPSTP tahun 2022	Banda Aceh	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen		PAD																													Rp	90,545,000							Rp	99,599,500									
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPI, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja, LPPA, LKPI, LKJIP/LAKIP, Rekam Jejak	Banda Aceh	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen		DAU																																Rp	9,575,000							Rp	10,532,500						
2	18	01	1.02																																											Rp	20,790,481,473							Rp	22,869,529,620						
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Terselurkannya Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Banda Aceh	100 %	14 Bulan	14 Bulan		DAU, PAD																																		Rp	18,344,610,473							Rp	20,179,071,520				
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Terpenuhinya Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap; Terpenuhinya pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselurkannya Gaji Tenaga Honorar/Tidak Tetap dan Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	100 %	62 orang	62 orang		DAU, PAD																																			Rp	2,205,355,000							Rp	2,425,890,500			
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Realisasi Anggaran, Neraca, Calk, LPE & LO)	Banda Aceh	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen		PAD, DAU																																				Rp	216,614,000							Rp	238,275,400		
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	Tersedianya Buku Besar; Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	Tersusunnya Buku Besar; Buku Register SPM, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan akhir tahun	Banda Aceh	100 %	24 buku	24 buku		PAD																																						Rp	23,902,000							Rp	26,292,200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2	18	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Rp	183,205,000				Rp	201,525,500		
2	18	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Keikutsertaan Aparatur pada Pelatihan, Bimtek dan kursus-kursus	Terlatihnya kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta	100 %	18 orang	18 orang	Rp	183,205,000	PAD, DAU		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	18 orang	Rp	201,525,500
2	18	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Rp	1,526,111,003					Rp	1,678,722,103	
2	18	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Alat Listrik dan elektronik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banda Aceh	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	38,140,692	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	41,954,761
2	18	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sewa Gudang , LED Videotron di Spg. Surabaya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banda Aceh	100 %	12 Bulan 1 Unit	12 Bulan 1 Unit	Rp	711,272,710	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	782,399,981
2	18	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banda Aceh	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	346,815,241	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	381,496,765
2	18	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	202,864,360	PAD		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	223,150,796
2	18	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	37,920,000	DBHCHT		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	41,712,000
2	18	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	189,098,000	DBHCHT		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	208,007,800
2	18	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp	5,237,696,526					Rp	5,761,466,179	
2	18	01	1.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pembangunan Ruang Rapat	Tersedian Ruang Rapat	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	1 Ruang Rapat	1 Ruang Rapat	Rp	5,237,696,526	PAD		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	5,761,466,179
2	18	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp	636,302,700						Rp	699,932,970
2	18	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peranko, material dan benda pos lainnya; Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	Tersedianya Peranko, material dan benda pos lainnya; Biaya Pengiriman Surat Dinas, Barang Cetak, Dokumen dan lainnya	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	4000 lembar 1200 kg	4000 lembar 1200 kg	Rp	47,200,000	PAD		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	51,920,000
2	18	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya anggaran Belanja Telepon, air, listrik dan kawat faximili/internet	Terbayarnya Belanja Telepon, air, listrik dan kawat faximili/internet	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp	471,357,750	DBHCHT		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	518,493,525
2	18	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Alkohol Hand Sanitizer (107); Sarung Tangan Fortune Sarung Tangan Plastik; Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah; Jasa Cleaning Service (Pihak Ketiga)	Terpenuhinya Kebit Alkohol Hand Sanitizer (107); Sarung Tangan Fortune Sarung Tangan Plastik; Jasa Retribusi Pengangkutan Sampah; Jasa Cleaning Service (Pihak Ketiga)	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	300: botol; 87: kotak pack; 2; kali; 1 paket	300: botol; 87: kotak pack; 2; kali; 1 paket	Rp	117,744,950	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp	129,519,445
2	18	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp	540,628,882					Rp	594,691,770	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Anggaran untuk pajak mobil dinas; pemeliharaan dan pajak kendaraan roda 2:	Terpelihara dan terbayarnya pajak mobil dinas; Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan roda 2:	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	23; unit; 11: unit	23; unit; 11: unit	Rp 429,859,000	DAU		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp 472,844,900
2	18	01	1.08	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan/rehab Peralatan Gedung Kantor	Terawat dan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Banda Aceh, Kuta Alam, Peunayong	100 %	12 Bulan	12 Bulan	Rp 110,769,882	PAD		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp 121,846,870
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							Rp 633,600,000					Rp 696,960,000	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							Rp 192,380,898					Rp 211,618,988	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1. Tersusunnya Rancangan Awal Peraturan Deregulasi Penanaman Modal 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan deregulasi penanaman modal		Kota Banda Aceh	1 Ranpergub 60 Peserta	1 Ranpergub 60 Peserta	Rp 63,415,898	PAD/DAU				Rp 69,757,488	
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1. Rekomendasi Perubahan Kebijakan Deregulasi Penanaman Modal, 2. Terpatakanya Indeks Daya Saing Tahun 2022 di Provinsi dan di seluruh Kab/Kota di Aceh,		Kota Banda Aceh	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Rp 128,965,000	PAD/DAU				Rp 141,861,500	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi							Rp 441,219,102					Rp 485,341,012	
2	18	02	1.02	02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1. Terlaksananya Investment Planning Forum 2. Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan Wilayah, 3. Tersusunnya revisi RUPM Aceh 4. Sosialisasi Penyusunan RUPM Kab/Kota	1. Terlatihnya peserta Investment Planning Forum; 2. Tersusunnya Rencana Pengembangan Penanaman Modal Sektor Usaha dan wilayah; 3. Tersusunnya Revisi RUPM Aceh 4. Terlatihnya peserta	Kota Banda Aceh	200 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	200 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 60 Orang	Rp 194,039,102	PAD/DAU		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp 213,443,012	
2	18	02	1.02	01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1. Tersedianya Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal 2. Penyusunan Prospektus Investasi 3. Tersedianya UKM yang siap bermitra dengan PMA/PMDN 4. Terlaksananya temu usaha antara UKM dengan PMA/PMDN (Investor Pitch Deck)	1. Tersusunnya Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal 2. Tersusunnya Prospektus Investasi 3. Tersedianya UKM yang siap bermitra dengan PMA/PMDN 4. Bertemunya temu usaha antara UKM dengan PMA/PMDN (Investor Pitch Deck)	Kota Banda Aceh	23 Dokumen 2 Prospektus 4 UKM 50 Peserta	23 Dokumen 2 Prospektus 4 UKM 50 Peserta	Rp 247,180,000	PAD/DAU		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp 271,898,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							Rp 1,550,822,720					Rp 1,705,904,992	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							Rp 1,550,822,720					Rp 1,705,904,992	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1). Terlaksananya Seminar Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 2). Penyusunan Analisa Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 3). Terlaksananya FGD Penyusunan Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh Berdasarkan Negara dan Kawasan (2x); 4). Tersusunnya Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target Dan Analisis Daerah Pesaing; 5). Terselenggaranya FGD Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing (2x); 6). Terlaksananya Seminar Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing;	1). Bertambahnya pengetahuan peserta Seminar Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 2). Tersusunnya Dokumen Analisa Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh berdasarkan Negara dan Kawasan; 3). Terlaksananya FGD Penyusunan Strategi/Kebijakan Promosi Investasi Aceh Berdasarkan Negara dan Kawasan (2x); 4). Tersusunnya Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target Dan Analisis Daerah Pesaing; 5). Terselenggaranya FGD Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing (2x); 6). Terlaksananya Seminar Analisis Minat Investasi Negara dan Kawasan Target dan Analisis Daerah pesaing;	Banda Aceh, Aceh Tengah, Sabang, Pulau Banyak-Singkil	35; Org;	35; Org;	Rp 512,141,083	PAD		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp 563,355,191
						7). Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penguatan Promosi Investasi Kab/kota Se-Aceh; 8). Terselenggaranya Business Seminar Branding Image dan Perception Investasi Aceh; 9). Workshop Virtual and Digital Marketing and Promotion; 10). Workshop Penyusunan Proyek Investasi; 11). Terlaksananya Virtual Business Promotion				56; Org;	56; Org;			Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Terlaksananya Keg. Promosi Investasi Aceh melalui Pameran dan Business Forum, publikasi melalui media cetak, sosial dan elektronik dan kegiatan promosi lainnya		Banda Aceh, Jakarta, India, UEA, China	7,3 T	10 Event Promosi (Pameran dan Bisnis Forum) 4 Publikasi melalui media cetak 50 Publikasi melalui Media Online Platform Media Sosial Video Promosi 4 Investasi Aceh Sistem dan Perangkat Promosi Digital (Website,CRM dan Kios Digital)	10 Event Promosi (Pameran dan Bisnis Forum) 4 Publikasi melalui media cetak 50 Publikasi melalui Media Online Platform Media Sosial Video Promosi Investasi Aceh Sistem dan Perangkat	Rp	1,038,681,637	PAD		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	1,142,549,801
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														Rp	1,445,571,266
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														Rp	1,445,571,266
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Terlaksananya :Pelatihan pengembangan capacity building staf; Sosialisasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK; Pelatihan OSS; Pelatihan Aplikasi SiCantik Cloud; Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus.		Lhokseumawe	7,3 T	40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 15 Izin/ Non Izin 1 SK Masterlist	40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 15 Izin/ Non Izin 1 SK Masterlist	Rp	200,123,000	PAD		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	220,135,300
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Jumlah izin dan non izin A, B dan C, Jumlah Peserta		Banda Aceh	7,3 T	555 396 3.835 Izin dan non izin	555 396 3.835 Izin dan non izin	Rp	727,908,796	PAD		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	800,699,676
p	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	1)Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu; 2)Terlaksananya Bimtek Tata Cara Penanganan Kasus, 3) Sosialisasi dan Pembinaan PTSP Kab/Kota, 4) Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan Pendampingan e-perizinan pada klinik perizinan, 5)Terlaksananya Movev Perizinan dan Non Perizinan, 6)Rapat Kerja PTSP, 7) Tersusunnya Buku IKM, 8)Terlaksananya Sosialisasi SOP dan SP, 9) Terlaksananya Bimtek Front Office, 10) Terlaksanya in house training terhadap petugas perziinan DPMPTS		kab/kota, langsa	7,3 T	9, kasus 50 orang 10 Kab/Kota 1 Kegiatan 45 Izin/Non Izin 30 Orang 1 Buku 50 orang 50 orang 50 orang	9, kasus 50 orang 10 Kab/Kota 1 Kegiatan 45 Izin/Non Izin 30 Orang 1 Buku 50 orang 50 orang 50 orang	Rp	386,123,900	PAD		Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	424,736,290

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	05								Rp	609,320,000					Rp	670,252,000	
2	18	05	1.01							Rp	609,320,000					Rp	670,252,000	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Terlaksananya kegiatan pemantauan, Laporan Realisasi Investasi	Banda Aceh dan Kab/kota	7,3 T	46, perusahaan, 4 laporan	46, perusahaan, 4 laporan	Rp	242,360,000	DBHCHT	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	266,596,000
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Terlaksananya kegiatan pembinaan	Banda Aceh dan Kab/kota	7,3 T	30 perusahaan	30 perusahaan	Rp	136,932,000	DBHCHT	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	150,625,200
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	Terlaksananya pengawasan di 23 kab/kota	Banda Aceh dan Kab/kota	7,3 T	30 perusahaan	30 perusahaan	Rp	230,028,000	DBHCHT	Meningkatnya jumlah dan Nilai Realisasi Investasi	7,3 T	Rp	253,030,800
2	18	06										Rp	405,000,000				Rp	445,500,000
2	18	06	1.01									Rp	405,000,000				Rp	445,500,000
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Terlaksananya pengolahan data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi; 2. Terlaksananya penyajian data perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi;	Kabupaten/kota dalam lingkup kewenangan penyelenggaraan pada Tingkat Daerah Provinsi	100%	1 laporan	1 laporan	Rp	405,000,000	PAD	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	100%	Rp	445,500,000

Ende	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja			Bencana Tahun 2022				Praktik MIPA Bencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Page Indikator (Pg.)	Rencana Dana	Cintan Pening	Target Capaian Kinerja	
						Program	Sub Kegiatan				Tidak Utkr	Target
		1. Terlaksananya pembangunan dan/atau pemertanian, pengangkutan, perbaikan dan sistem informasi dan pengangkutan maritim. 4. Pelaksanaan administrasi rutin pada bidang pengangkutan laut dan informasi PM.	3. Terwujudnya pembangunan dan/atau pemertanian, pengangkutan, perbaikan, serta pemertanian sistem informasi dan pengangkutan maritim. 4. Pelaksanaan administrasi rutin pada bidang pemertanian laut dan informasi PM.			1 laporan	1 laporan					
						1 laporan	2 laporan					

Banda Aceh, 13 Juli 2021
 Kepala Dinas Perencanaan, Anggaran, Modal dan
 Peltayanan Tambak, Batu Pintu Aceh ♀

 Hidayat, ST, CEA
 Peltanyaan Tk. I
 NIP. 19770805 200312 1 005